

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Sosialisasi Politik

###### a. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses belajar seseorang untuk menghayati kebudayaan masyarakat yang ada dilingkungannya.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut sosialisasi merupakan penyampaian kepada masyarakat tentang nilai-nilai ataupun kultur dalam lingkungannya.

Sosialisasi politik menurut Ramlan Surbakti yaitu suatu metode penyampaian pesan politik, yang telah dibagi menjadi dua antara lain pendidikan politik dan indoktrinasi politik.<sup>24</sup> Sosialisasi politik merupakan bentuk dari pendidikan politik yang mempunyai tujuan untuk membangun bagaimana sikap masyarakat dalam berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang telah ada.<sup>25</sup> Dalam proses politik, keterlibatan individu-individu maupun kelompok-kelompok untuk berpartisipasi dalam suatu proses politik menjadi suatu hal yang penting.

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr mendefinisikan sosialisasi politik sebagai “*The process by which political cultures are formed, maintained, and changed*”. Definisi ini cenderung menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan budaya sosial politik yang di dalamnya diperkenalkan nilai-nilai politik.<sup>26</sup> Dalam pendidikan di Indonesia, konsep ke-Bhinekaan telah diajarkan sejak dini. Nilai-nilai Pancasila telah ditanamkan melalui proses sosialisasi politik dilingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat bahwa proses pengenalan dan pendalaman nilai-nilai politik memiliki sifat stabil dan berkesinambungan.

<sup>23</sup><https://kbbi.web.id/>, ”Sosialisasi” diakses 11 Mei 2022.

<sup>24</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.117.

<sup>25</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 154.

<sup>26</sup>Zulfikri Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara,2010), hlm. 20.

Sosialisasi politik menurut Mary G. Kweit dan Robert W. Kweit merupakan proses seorang individu belajar tentang politik yang akhirnya akan terbentuk menjadi orientasi politik dan bertujuan untuk stabilitas suatu sistem politik. Dengan demikian proses sosialisasi politik membawa misi untuk membentuk orientasi politik demi tercapainya stabilitas.<sup>27</sup>

Sosialisasi politik menurut Alex Thio merupakan proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, keyakinan dan sikap politik.<sup>28</sup> Ada dua hal penting tentang sosialisasi politik yang berkaitan dengan proses dan tujuan, sehingga proses yang memiliki nilai dapat dikaitkan dengan aspek politik dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam aspek politik kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Rush dan Althoff, sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan seseorang ke dalam sistem politik dan bagaimana orang tersebut menentukan bagaimana reaksi dan tanggapan terhadap fenomena politik.<sup>29</sup>

Melalui beberapa penjelasan mengenai pengertian sosialisasi politik, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan upaya edukatif yang bertujuan untuk membentuk individu agar sadar politik. Sehingga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjadi pelaku politik partisipan yang bertanggung jawab. Sosialisasi politik merupakan pembelajaran politik agar masyarakat dapat mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik di negaranya. Hal itu akan berguna bagi masyarakat dalam partisipasi politik dan dapat memanfaatkan rekrutmen politik yang dilakukan oleh pemerintah atau partai politik.

#### **b. Jenis Sosialisasi Politik**

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Mary G Kweit dan Robert W. Kweit, *Konsep dan Metode Analisis Politik terj.Ratnawati*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hlm.93.

<sup>28</sup>Susi Fitria Dewi, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Gre Publishing,2017), hlm.58.

<sup>29</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 58.

<sup>30</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.117.

## 1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran tentang politik pemerintahan yang terjadi antara pemberi materi dan penerima materi. Adanya pendidikan politik, masyarakat akan mengetahui nilai, norma, dan simbol-simbol politik yang ada di negaranya. Tujuan pendidikan politik adalah untuk membangun kesadaran, pendapat, pemahaman serta perilaku seseorang untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik. Pemberi materi dalam proses pendidikan politik dilakukan oleh pemerintah, partai politik maupun sekolah. Kegiatan tersebut dalam bentuk kursus, latihan kepemimpinan, diskusi maupun dalam forum partai politik.

## 2. Indoktrinasi Politik

Indoktrinasi politik ialah proses memobilisasi masyarakat untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi. Indoktrinasi yaitu pemerintah yang mengontrol pandangan politik masyarakatnya. Partai politik dalam sistem politik sangatlah totaliter dalam melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

### c. Agen-Agen Sosialisasi Politik

Melalui agen sosialisasi, sosialisasi politik berkaitan dengan kewajibannya yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi melalui suatu kegiatan atau program yang telah dirancang. Suatu keharusan agen sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap kondisi sosial politik pada pesta demokrasi yang berlangsung. Agen sosialisasi politik terdiri dari berbagai pihak yang berperan dalam memberikan pengetahuan terkait aspek politik. Agen sosialisasi politik juga dapat didefinisikan sebagai individu atau lembaga yang membantu dalam proses pembentukan budaya politik individu. Proses sosialisasi berhasil karena didukung oleh agen sosialisasi politik.<sup>31</sup> Proses sosialisasi berhasil karena didukung oleh agen sosialisasi politik. Agen

---

<sup>31</sup>Agus Rusmana, dkk. *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi*, (Bandung: Media Akselerasi, 2019), hlm.90.

sosialisasi politik yang ada dimasyarakat menurut Gabriel Almond antara lain.<sup>32</sup>

- a. Keluarga. Keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan pilihan politik seseorang karena merupakan pihak sosialisasi pertama pada setiap individu. Keluarga membentuk sikap-sikap politik, hal ini terlihat dalam kecenderungan bahwa anak akan mengadopsi pandangan politik yang dimiliki orang tuanya. Artinya jika orang tuanya berafiliasi dengan mendukung dan memilih salah satu partai politik, besar kecenderungan seorang anak akan berafiliasi dengan mendukung dan memilih partai politik yang sama. Orang tua yang aktif berpartisipasi politik biasanya memiliki anak yang juga tertarik dalam bidang politik dan memiliki pemahaman politik yang baik.
- b. Sekolah. Sekolah memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang dunia perpolitikan. Sekolah juga pewaris dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah yang dimaksud dalam hal ini adalah tempat seorang individu menempuh pendidikan formal dan informal. Orang yang terpelajar lebih kompeten untuk bertindak laku dalam berpolitik. Mereka lebih sadar akan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka dan lebih memperhatikan kehidupan politik, serta mengetahui bagaimana proses politik berjalan dengan semestinya.
- c. Kelompok Pergaulan. Perbedaan pendapat dalam suatu kelompok adalah suatu kewajaran, seseorang akan menyesuaikan pendapat dengan teman-temannya. Kelompok pergaulan juga dapat membentuk sikap-sikap politik seseorang. Kesadaran politik akan tumbuh dilingkungan teman sebaya yang juga menyukai diskusi tentang politik maupun pemerintahan. Kelompok pergaulan secara tidak langsung menjadikan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sikap maupun tingkah laku yang dianut oleh kelompoknya.
- d. Pekerjaan. Pekerjaan dan organisasi yang dibentuk oleh lingkungan pekerjaan merupakan penghubung informasi yang jelas. Individu akan mengidentifikasi dirinya

---

<sup>32</sup>Efriza, *Political Explore sebuah kalian ilmu politik*, (Bandung : ALFABET, 2012), hlm. 19.

dengan suatu kelompok dan menjadikan suatu acuan dalam kehidupan politiknya. Mereka juga akan menilai apapun yang dilakukan oleh kelompoknya berdasar pada perhitungan yang paling baik bagi kelompoknya.

- e. Media massa. Pada jaman saat ini, hampir semua masyarakat menggunakan dan menghabiskan waktunya pada media massa maupun media sosial. Sebagai alat informasi yang teraktual tentunya media massa dapat menyebarkan informasi penting dari berbagai belahan dunia yang hanya beberapa jam saja sudah tersebar menjadi pengetahuan umum. Media massa harus bisa memberikan pemberitaan maupun informasi terkait sosialisasi politik dalam segala bentuk yang efektif dan tidak tertutup oleh konten-konten hiburan. Sehingga masyarakat dapat lebih paham terhadap sistem politik pemerintahan.
- f. Peristiwa politik. Agen sosialisasi politik ini adalah yang secara rutin memberikan pendidikan bagi masyarakat. Sosialisasi politik ini sering terjadi pada masa pemilu yang bertujuan untuk memilih pejabat atau pemerintah yang akan berkuasa. Sosialisasi politik tersebut biasa dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh partai-partai politik secara langsung dan yang terlibat didalamnya.

#### **d. Tujuan Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik menanamkan nilai-nilai, yang kemudian menjadi pola keyakinan dan kepercayaan sosial. Sosialisasi politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap masalah politik, meningkatkan kualitas politik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran politik dan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan politik, dan dengan demikian meningkatkan kualitas politik bangsa secara keseluruhan.<sup>33</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan sosialisasi politik adalah melestarikan sistem politik dan sistem nilai yang mendasarinya.

#### **e. Fungsi Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan kunci untuk memahami sistem politik, maka sosialisasi politik berfungsi

---

<sup>33</sup>Fungsi Sosialisasi Politik, <https://duniapendidikan.co.id/fungsi-sosialisasi-politik/>, diakses 11 Mei 2022.

untuk menentukan arah partisipasi politik masyarakat. Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff adalah melatih individu dalam memahami nilai-nilai politik dan memelihara sistem politik yang berlaku.<sup>34</sup> Fungsi sosialisasi politik pada umumnya, antara lain :

- 1) Menanamkan nilai-nilai dan norma-norma pada masyarakat.
- 2) Mengenalkan visi dan misi partai politik pada masyarakat.
- 3) Memperkaya pengetahuan, pemahaman, serta pengkhayatan rakyat dalam perpolitikan.
- 4) Mengenalkan rencana-rencana/program pemerintah kepada rakyat sebelum menjadi kebijakan/keputusan.
- 5) Meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- 6) Meningkatkan keterlibatan rakyat dalam pemerintah.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik berfungsi untuk membangun masyarakat yang paham dan berpengetahuan akan politik, mengajarkan nilai-nilai yang ada dipolitik, sebagai informasi, instruksi, dan persuasi. Dengan begitu, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada di pemerintahan.

#### f. Perilaku Pemilih Masyarakat

Ada banyak teori yang telah menjelaskan tentang perilaku pemilih tetapi secara umum ada 3 pendekatan untuk menganalisis perilaku memilih dalam suatu pemilihan umum yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional menurut Saiful Mujani, R. Willian Liddle dan Kusridho Ambardi dalam buku karyanya *Kuasa Rakyat* (2011).

##### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap manusia terikat di dalam lingkaran sosial, seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan sebagainya. Seseorang didorong untuk menyesuaikan diri sehingga

---

<sup>34</sup>Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 119.

<sup>35</sup>Fungsi Sosialisasi Politik, <https://duniapendidikan.co.id/fungsi-sosialisasi-politik/>, diakses 11 Mei 2022.

dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam pemberian suara dalam suatu pemilihan.<sup>36</sup>

Arah politik di lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Dalam pendekatan ini, banyak sarjana ilmu politik mengemukakan tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari berbagai ikatan sosial yang ada yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.<sup>37</sup> Faktor sosiologis yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih dalam suatu pemilu yaitu meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, agama dan tingkat religiusitas, ras dan etnik, atau sentimen kedaerahan, domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan, jenis kelamin, dan usia. Model sosiologis membangun asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, kelompok etnik atau kedaerahan dan bahasa.<sup>38</sup>

Seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadarannya tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan semua warga negara. Orang yang punya kesadaran ini biasanya relatif berpendidikan. Oleh karena itu orang yang berpendidikan lebih mungkin ikut pemilu dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan. Selain pendidikan, status pekerjaan jugadapat mempengaruhi partisipasi seseorang dalam pemilu. Jika dibandingkan, orang yang bekerja kemungkinan besar ikut pemilu dibandingkan dengan orang yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini dikarenakan, orang yang tak memiliki pekerjaan perhatiannya lebih terfokus dalam mencari pekerjaan, sehingga kemungkinan besar tidak mengikuti kegiatan politik seperti pemilu. Tingkat pendapatan seseorang juga dapat mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Orang yang berpendapatan lebih baik

---

<sup>36</sup>Saiful Mujani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 6.

<sup>37</sup>Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: Friedrich-nauman-siftung De Freiheit, 2008), hlm. 27.

<sup>38</sup>Saiful Mujani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 6.

kemungkinan besar ikut serta dalam pemilu, dikarenakan mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap yang berkaitan dengan kebijakan publik.<sup>39</sup>

Seseorang yang berstatus sosial-ekonomi tinggi kemungkinan besar mengikuti pemilu hanya bila ia berada dalam jaringan sosial yang kemungkinan terjadinya proses mobilisasi politik. Orang yang aktif dalam organisasi-organisasi formal ataupun informal, cenderung lebih terlibat dengan urusan-urusan publik karena terpaan informasi melalui pembicaraan dengan sesama anggota jaringan. Merekapun mudah dihubungi dan dijangkau oleh orang, kelompok, atau partai yang berkepentingan dengan partisipasi politik. Sedangkan, seseorang yang jauh dari jaringan sosial, cenderung sulit dicapai oleh informasi dan aksi mobilisasi.<sup>40</sup>

Agama juga menjadi faktor sosiologis lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih partai politik atau calon pejabat publik. Seseorang akan memilih dan mendukung partai politik atau kandidat yang memiliki *platform* keagamaan yang sama dengan karakteristik keagamaannya. Sehingga, orang yang taat beragama cenderung mendukung partai berdasarkan keagamaan dibandingkan partai sekuler.<sup>41</sup>

Faktor sosiologis yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih adalah terkait dengan etnik yaitu sentimen kedaerahan. Seorang calon pejabat publik yang mempunyai keterkaitan atau memperjuangkan kepentingan suatu daerah tertentu cenderung akan dipilih dan didukung oleh pemilih yang berasal dari daerah bersangkutan. Begitupun juga dengan partai yang secara tradisional memperjuangkan

---

<sup>39</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm.7.

<sup>40</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 8.

<sup>41</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 14.

kesetaraan ras dan etnik cenderung didukung oleh kelompok-kelompok ras dan etnik yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa agama, pendidikan, status pekerjaan, lingkaran sosial (lingkungan), suku, dan kedaerahan berpengaruh dalam pembentukan perilaku pemilih.

## 2. Pendekatan Psikologis

Pemilih yang mempunyai tingkat sosial-ekonomi yang tinggi dan berada dalam jaringan sosial yang mudah dijangkau oleh partai atau elite politik, belum tentu berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak tertarik atau tidak mempunyai ikatan psikologis dengan partai atau tokoh tertentu. Pendekatan ini memperkenalkan budaya demokrasi atau disebut *civic culture*. Seseorang ikut serta dalam pemilu bukan karena kondisi sosial-ekonominya lebih baik atau karena dalam jaringan sosial yang mudah dijangkau. Akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, mempunyai kedekatan dengan partai tertentu (partai identitas), memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihannya, merasa suaranya berarti, dan percaya pilihannya dapat memperbaiki keadaan (*politic efficacy*).<sup>43</sup>

Seseorang cenderung lebih mampu menentukan sikap dan melakukan tindakan politik seperti berpartisipasi dalam pemilu, apabila mempunyai informasi tentang masalah publik. Begitupun sebaliknya, seseorang yang cenderung tidak bersikap, tidak bertindak, dan tidak berpartisipasi dengan kepentingan publik adalah orang yang kurang mempunyai informasi atau kurang tau tentang masalah publik. Maka, dengan

---

<sup>42</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru...* hlm.19.

<sup>43</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm.22.

adanya informasi politik dapat dipercaya membantu seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.<sup>44</sup>

Ketertarikan seseorang terhadap politik juga dipercaya sebagai *political efficacy*, yaitu perasaan seseorang yang merasa bahwa dirinya mampu memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Merasa optimis dan kompeten dalam melihat dan menyikapi masalah publik yang terjadi di suatu bangsa. Karena merasa bisa memahami dan mempengaruhi keputusan-keputusan publik, sekecil apapun, maka seorang warga cenderung melihat makna positif dari keterlibatannya dalam masalah-masalah publik. Warga seperti ini juga optimis dalam melaksanakan pemilu, bahwa pemilu berguna dan positif bagi kebaikan publik. Sikap seperti ini dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut.<sup>45</sup> Kesadaran akan pentingnya peran warga negara tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi harus menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya dapat mempengaruhi dan berdampak pada proses politik di negaranya. Keyakinan bahwa seseorang akan lebih bermanfaat apabila melakukan tugas kewarganegaraannya.

Dalam pendekatan psikologis, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena adanya sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal. Hal ini termasuk proses pembentukan identitas partai. Orang tua pendukung partai politik tertentu cenderung akan menumbuhkan sikap partisan yang sama pada anggota keluarga yang lain. Sosialisasi yang diterima seseorang baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah pada masa kecil, akan mempengaruhi pilihan politik mereka. Dengan demikian,

---

<sup>44</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*,... hlm. 23.

<sup>45</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm.24.

pendekatan psikologi meliputi ikatan emosional pada satu parpol, dan ketokohan.<sup>46</sup>

Dari penjelasan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan psikologis yaitu melihat perilaku pemilih sebagai bagian dari proses terbentuknya ikatan emosional yang akan mengarahkan tindakan politik seseorang dalam pemilihan berdasarkan pada identifikasi partai dan ketokohan.

### 3. Model Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional menjadikan kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi. Tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang akan mencalonkan diri agar terpilih dalam suatu pemilihan. Pemilih akan mempertimbangan untung dan rugi yang akan digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, serta untuk menentukan keputusan untuk ikut memilih atau tidak ikut memilih.<sup>47</sup>

Anthony Downs menjelaskan rasionalitas adalah apabila seseorang dalam menentukan pilihannya didasarkan pada pengetahuan terbaik yang telah diketahuinya, dengan sumber daya yang paling sedikit. Artinya bahwa seseorang yang rasional ketika hendak mewujudkan sesuatu yang diinginkan akan lebih menyukai bila biayanya seminimal mungkin. Downs juga mengemukakan bahwa pemilih yang rasional yaitu pemilih yang egois hanya menuruti kepentingannya sendiri. Dalam hal lain, pemilih rasional mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain. Pada konteks perilaku memilih, masyarakat yang tergolong dalam pemilih rasional akan memilih kandidat atau partai yang menguntungkan baginya. Pemilih rasional hanya tertarik dengan keuntungan yang

---

<sup>46</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm.26.

<sup>47</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo,2010), hlm. 211.

diperolehkan tidak tertarik dengan konsep politik yang telah ada.<sup>48</sup>

Dalam model pilihan rasional, pemilih akan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya di bawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu. Bila keadaan ekonomi rumah tangga seorang pemilih di bawah pemerintahan sekarang lebih baik dibanding periode sebelumnya, maka pemilih tersebut cenderung akan memilih partai atau calon pejabat pemerintah yang sekarang. Begitupun sebaliknya, jika pemilih tersebut merasa bahwa keadaan ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk dibanding sebelumnya, maka ia cenderung tidak memilihnya. Dalam pendekatan pilihan rasional ada beberapa faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang, seperti faktor isu-isu politik, caleg, visi misi, program kerja, serta transaksi politik yang dapat berupa komitmen atau kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai faktor situasional tersebut, dan dapat dikatakan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.<sup>49</sup>

## 2. Partai Politik

### a. Definisi Partai Politik

Secara terminologi, istilah “partai” adalah suatu bagian (part). Dalam bahasa Perancis disebut *partager* yang berarti membagi-bagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *partaking* yang artinya mengadakan kemitraan atau partisipasi.<sup>50</sup>

Dalam buku *Modern Political Parties*, Sigmund Neuman, mendefinisikan partai politik sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Anthony Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie*, engl : An Economic Theory of Democracy 1957(New York): Tubingen, 1968), hlm. 26.

<sup>49</sup>Saiful Munjani, Liddle William, & Ambardhi Kuskridho, *Kuasa Rakyat. Analisis Tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca orde baru*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 33.

<sup>50</sup>Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 283.

<sup>51</sup>Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)hlm. 404.

*A political is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other grup or groups holding divergent views).*

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

Sedangkan partai politik menurut Carl J. Frederich adalah:<sup>52</sup>

*A political party is a group of human beings stablyorganized with the objective of securing of maintaining for itsleaders the control of a government, with the further objective of giving members party, thourgh such control ideal and material benefits and advantages.*

(Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan itu memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil).

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi SistemPresidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 85.

<sup>53</sup>Dalam undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang diakses melalui [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2011\\_2.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_2.pdf), pada tanggal 18 April 2022.

Partai politik secara umum adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional hal ini dilakukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>54</sup> Di Indonesia, partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi. Sehingga partai politik harus menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita yang ideologis. Serta dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata “partai” dalam al-Qur’an disebut “*hizb*”, yang secara harfiah berarti; **pertama**, partai adalah organisasi yang memiliki kesamaan ide dan aktivitas; **kedua**, organisasi yang mempunyai kekuatan dan persaudaraan; **ketiga**, kader yang ikut berpartisipasi. Dari definisi kata tersebut, partai atau *hizb* adalah organisasi masyarakat yang bersatu karena memiliki tujuan, arah dan tujuan yang sama.<sup>55</sup> Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Alquran, salah satunya;

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ



Artinya: “Dan barangsiapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka itu adalah Partai Allah yang pasti akan mendapat kemenangan.” (Q.S. Al-Maidah (5): 56).

Persoalan mengenai partai politik oleh para pakar siyasah sering dikaitkan dalam bukunya dengan perkataan *Hizb* didalam Al Qur’an. Para pakar siyasah menyimpulkan perkataan *Hizb* merupakan ekuivalen untuk istilah dari partai pada zaman modern ini, dan juga mereka merujuk pada

<sup>54</sup>Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi SistemPresidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 85.

<sup>55</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai Politik Dalam Perspektif Islam*, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

firman Allah dalam Al Qur'an: "*Kullu hizbi bima ladaihim faarihun* (Tiap-tiap golongan/party merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing)".<sup>56</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Partai Politik**

Partai politik dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi, antara lain:<sup>57</sup>

- a. Partai Proto adalah model awal partai politik sebelum mengalami perkembangan seperti saat ini. Partai seperti ini muncul di Eropa Barat pada abad ke-19 pertengahan hingga akhir. Ciri yang paling menonjol dari partai ini adalah adanya perbedaan antara kelompok anggota dan non-anggota. Karena partai golongan ini dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat, sehingga partai proto belum menunjukkan ciri partai politik dalam pengertian modern.
- b. Partai kader merupakan perkembangan dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih bagi rakyat. Keanggotaan partai ini berasal dari golongan menengah ke atas. Sehingga hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, dan pemberian dana sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih terlihat sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin.
- c. Partai massa muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti: buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tidak hanya untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi tujuan

---

<sup>56</sup>Surah Al-Mu'minun (23) ayat 53.

<sup>57</sup>Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 285.

partai massa juga memberikan pendidikan politik bagi para anggota/rakyat.

- d. Partai diktatorial merupakan suatu tipe partai massa tetapi ideologi yang dimilikinya lebih kaku dan radikal. Karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologinya, maka kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat atau selektif.
- e. Partai Catch-all adalah gabungan partai kader dan partai massa. Otto Kirchheimer mengemukakan istilah Catch-all yang bertujuan untuk memberikan tipologi pada partai-partai politik di Eropa Barat agar mengalami perubahan karakteristik pasca perang dunia kedua. Catch-all dapat diartikan menampung atau mengumpulkan kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin agar bisa dijadikan anggotanya.

### c. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo dibagi menjadi empat, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sebagai pengatur konflik.<sup>58</sup>

#### a) Sarana komunikasi politik

Partai politik bertugas menyalurkan ragam pendapat dan aspirasi masyarakat sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang. Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan berbagai rencana dan kebijaksanaan pemerintah. Partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

#### b) Sarana sosialisasi politik

Dalam usaha memperoleh kemenangan dalam pemilu, partai politik harus memiliki dukungan sebanyak mungkin. Dalam hal ini partai politik akan memperjuangkan kepentingan umum. Selain menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mengajarkan anggota-anggotanya untuk bertanggungjawab sebagai warga negara. Proses sosialisasi politik dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan politik, ceramah, kursus kader, kursus penataran, dan lain-lain.

---

<sup>58</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), hlm. 405.

c) Sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan. Partai politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat agar aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Partai politik juga menarik golongan muda untuk dijadikan kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama. Dalam hal ini partai juga memperluas partisipasi politik melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain.

d) Sebagai pengatur konflik

Terjadinya konflik disaat suasana demokrasi merupakan persoalan yang wajar, karena adanya persaingan dan perbedaan pendapat. Partai politik akan berusaha mengatasi saat terjadi konflik. Namun pada kenyataannya, informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan mengakibatkan perpecahan masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional akan tetapi kepentingan partai, konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malah dipertajam.

**d. Partai Politik Islam**

Partai Islam terdapat dua macam, yaitu: pertama, Partai yang berazaskan Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB). Kedua, partai yang konstituen utamanya adalah umat islam, tetapi tidak menjadikan Islam sebagai azaznya. Kelompok ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang konstituen utamanya adalah warga NU, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) yang konsituen utamanya warga Muhammadiyah.

Partai politik Islam merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari sekelompok orang yang beragama islam, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Partai yang menjadikan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai azas dalam menentukan visi dan misi partai.
- b. Partai yang menjadikan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai landasan untuk kemantapan perjuangan partai.
- c. Partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

- d. Partai yang memiliki program untuk memperjuangkan Islam, umat Islam, serta kemaslahatan umat.
- e. Partai yang mempunyai basis pendukung, kader, dan partisan yang keseluruhannya beragama Islam.<sup>59</sup>

Penjelasan diatas adalah ciri khas dari partai politik Islam. Partai politik berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Penyebab kekalahan partai-partai Islam yaitu *pertama*, metode dan materi kampanye yang kurang tepat. Kampanye adalah upaya terorganisasi untuk mendapatkan dukungan publik. Kampanye politik bertujuan meyakinkan publik bahwa aspirasi mereka akan diperjuangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan kampanye membutuhkan metode dan materi yang tepat. *Kedua*, rendahnya kredibilitas tokoh-tokoh partai di mata umat. Kredibilitas adalah prasyarat agar pesan-pesan anda didengar orang. *Ketiga*, rendahnya tingkat pendidikan umat. Pendidikan membuat seseorang mampu mengembangkan dan menggunakan hati nurani, kemampuan mental, moral dan fisiknya untuk melaksanakan sesuatu dengan baik, berfikir secara rasional dan bersikap independen membuat pilihan-pilihan yang rasional, termasuk pilihan politik. Harus diakui bahwa tingkat pendidikan sebagian besar umat Islam di negeri ini masih rendah. Adalah wajar jika mereka belum mampu bersikap independen dan membuat pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan-pilihan politik mereka. *Keempat*, peran media. Peran massa media, termasuk buku, film, surat kabar, televisi dan majalah memainkan peranan penting dalam politik. Media adalah information base karena sangat berpengaruh dalam rangka membangun opini publik dan mentransmisi informasi. Oleh sebab itu, peran media massa sama pentingnya dengan peran pemerintah dalam membentuk serajat respek dan kepercayaan publik pada sistem dan tokoh-tokoh politik. *Kelima*, sebagian umat bingung memilih. Apalagi jika pilihan-pilihan tersebut tidak jelas bedanya satu sama lain

---

<sup>59</sup>Ridlo Al Hamdi, *Partai Politik Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 9.

dan pemilih tidak punya independensi dan kemampuan rasional untuk menentukan pilihannya.<sup>60</sup>

### 3. Pemilihan Umum

#### a. Definisi Pemilihan Umum

Bagi negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), menganggap pemilu sebagai lambang dan tolak ukur utama dari demokrasi. Yang berarti pelaksanaan dan hasil pemilu adalah refleksi dari bentuk keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar pemilu. Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu dianggap suatu cerminan pendapat warga negara, yang merupakan refleksi dari keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari suatu kedaulatan rakyat.<sup>61</sup>

Menurut Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipal, karena melaksanakan pemilu adalah suatu keharusan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi tersebut. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian pemilu merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>62</sup> Sementara itu, pemilu menurut M. Rusli Karim yaitu salah satu sarana untuk menegakkan tatanan suatu demokrasi yang bertujuan untuk menjaga dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan dari demokrasi.<sup>63</sup> Pemilu adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, melaksanakan pemilu sebagai suatu kegiatan rutin yang diadakan dalam waktu setiap lima tahun sekali.

---

<sup>60</sup> Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta: Ak Group, 2004), hlm. 77-79

<sup>61</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 329-330

<sup>62</sup>Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 49.

<sup>63</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 331.

Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu mekanisme untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan mengisi suatu jabatan atau pergantian kekuasaan yang harus dijalankan secara konstitusional. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu kurun tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pendelegasian, pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik oleh rakyat kepada wakil rakyat untuk menjalankan suatu pemerintahan.

#### **b. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk memfasilitasi proses perebutan jabatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Melalui pemilu, rakyat akan memilih pemimpin atau pejabat yang akan menentukan nasib negaranya untuk lima tahun kedepan. Dalam hal ini pemegang kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu:<sup>64</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;

---

<sup>64</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 276.

- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat di lembaga perwakilan yang akan mewakili kepentingan rakyat;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Prihatmoko, dalam pelaksanaan pemilu memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. Sebagai mekanisme yang berguna untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan sebagai alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai perpindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada perwakilan rakyat melalui wakil atau partai terpilih yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan dari rakyat dengan ikut serta dalam proses politik. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>65</sup>

Pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi seperti yang diungkapkan oleh Arbi Sanit, yakni:<sup>66</sup>

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
- b. Pembentukan wakil politik rakyat
- c. Sirkulasi elit penguasa
- d. Pendidikan Politik

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Penulis mencoba untuk menelaah terlebih dahulu sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku dan jurnal guna menemukan kebaharuan dalam penelitian ini. Maka

---

<sup>65</sup>Khoiril Huda,Zulfa A F, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan PersainganPemicu Perpecahan Bangsa”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4,Nomor 3 Tahun2018, hlm. 551. diakses melalui<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848>pada tanggal 18April 2022.

<sup>66</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 333.

dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori Yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan penelitian ini
1.	Mahyuddin, 2015 "Pelaksanaan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Orientasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa"	Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi politik faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan sosialisasi politik melalui media massa terhadap orientasi politik masyarakat.	Teori sosialisasi politik	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan sosialisasi politik melalui media massa telah terlaksana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi didalam pemilihan umum karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak datang memilih dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum. Disebabkan karena tidak adanya Sosialisasi melalui media massa, dan fasilitas yang kurang memadai di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sosialisasi politik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang sosialisasi politik melalui media massa sedangkan penelitian saya fokus pada sosialisasi politik suatu partai Islam.
2.	Alissa Januar Ramadanty, 2019 "Partai Politik dan Sosialisasi Politik (Strategi Politik Rian Ernest Pada Pemilu	Untuk mengetahui strategi politik Rian Ernest agar mendapat dukungan dari masyarakat dan untuk mengetahui	Teori partai politik dengan konsep strategi dan sosialisasi politik	Deskriptif kualitatif	Strategi sosialisasi politik yang digunakan yaitu melalui media sosial seperti Fanpage Facebook, Instagram, Twitter dan	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang konsep sosialisasi politik.

	Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jakarta Timur)”	faktor pendukung dan penghambat sehingga dapat dipilih pada Pemilu Legislatif 2019 di Dapil Jakarta Timur.			Youtube yang memiliki konten serta penggunaan caption yang menarik perhatian masyarakat maupun anak mudadan juga menggunakan strategi komunikasi tatap muka ke beberapa wilayah menemui warga secara langsung ditemani oleh relawan-relawan.	Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang keberhasilan strategi sosialisasi politik Rian Ernest sehingga dapat masuk kedalam peringkat lima besar yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sedangkan penelitian saya fokus pada kegagalan sosialisasi politik partai Islam sehingga memperoleh suara rendah.
3.	Agung Pangestu, 2020 “Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019”	Untuk mengetahui bagaimana upaya partai politik Islam dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya dan untuk mengetahui peranan partai politik Islam dalam menjalankan fungsinya untuk pengoptimalan perolehan suara di Kabupaten Banyumas.	Teori Partai Politik	Deskriptif kualitatif	Partai Politik Islam telah berupaya maksimal dalam menjalankan peranannya, namun hal ini masih belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat secara umum sehingga usaha yang dilakukan partai politik ini kurang didukung dengan baik dan kurangnya dukungan melalui kritik yang bersifat	Persamaan dalam penelitian ini adalah Subjek kajiannya, membahas mengenai kekalahan PartaiPolitik Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini Subjek kajiannya, jika penelitian ini fokus objek kajiannya meneliti PartaiPolitik Islam

					membangun.	diKabupaten Banyumas, penelitian saya meneliti Partai Politik Islam di Kabupaten Kudus.
4.	<p>Isnaini Nurul Fajri, 2018                  “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).”</p>	<p>Untuk mengetahui sikap masyarakat kelurahan Korpri Jayamendukung atau memihak maupun tidak mendukung atau tidak memihak terhadap partai Islam.</p>	Teori Sikap	Kuantitatif	<p>Masyarat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar yang memiliki sikap positifterhadap partai politik Islam sebanyak 48%, karena parpol Islam didaerah ini memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menggunakan flatform Al-Quran. 31% masyarakat bersikap biasa saja, kemudian 15% bersikap negatif terhadap partai politik Islam karena adanya kasus korupsi yang melibatkan partai politik Islam.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah subjek kajiannya membahas tentang partai politik Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian Isnaini fokus pada sikap masyarakat terhadap partai politik Islam, sedangkan penelitian saya fokus pada sosialisasi politik partai politik Islam.</p>
5.	<p>Loso, Turtiantoro, Susilo Utomo                  Jurnal Ilmu Pemerintahan, Tahun 2013                  “Analisis Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Memperebutkan Kursi di DPRD</p>	<p>Untuk menganalisis mengapa partai keadilan sejahtera tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Batang.</p>	Teori partai politik dan marketing politik	Deskriptif Kualitatif	<p>Partai Keadilan Sejahtera kurang mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Batang karena adanya <i>gap</i> antara kader dengan masyarakat, kader PKS juga tidak merata,</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekalahan partai Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini wilayah</p>

	Kabupaten Batang”.				sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui PKS. Adanya isu terorisme yang beredar di masyarakat, adanya <i>money politik</i> di kubu lawan, sehingga kegiatan sosialisasi tidak mengena dihati masyarakat ketika pemilihan umum.	penelitian, penelitian ini membahas partai Islam di Kabupaten Batang sedangkan penelitian saya fokus pada partai Islam di Kabupaten Kudus.
6.	Ahmad Syarifuthohirin, AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah Vol.7 No.1 Tahun 2019 “Dinamika Partai Islam dalam Pemilu di Rembang Tahun 1998-2015”.	Untuk mengetahui dinamika partai Islam di Rembang.	Strategi Politik	Deskriptif Kualitatif	Partai Islam di Rembang memiliki suara yang stabil. Sehingga didalam pelaksanaan pemilu mendapatkan suara yang cukup lumayan.	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah subjek kajiannya membahas tentang partai politik Islam.Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus pada kestabilan perolehan suara partai Islam, sedangkan penelitian saya fokus pada perolehan suara partai Islam memperoleh suara yang rendah.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian berawal dari hasil perolehan suara partai Islam di Kecamatan Undaan pada pemilu 2019 yang memperoleh suara paling rendah di Kabupaten Kudus. Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan partai Islam kepada masyarakat di Kecamatan Undaan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minimnya perolehan suara partai Islam, sehingga partai Islam di Undaan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Guna memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

